

## Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Milik Negara (*State Owned Enterprise*)

Yeni Priatnasari<sup>1</sup>,  
Hetika<sup>2</sup>, Andri  
Widianto<sup>3</sup>

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji tentang pengungkapan risiko yang saat ini menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan peneliti. Ada beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian deskriptif *mandatory* dan *voluntary disclosure* pada BUMN di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan tingkat *mandatory disclosure* yang harus dilakukan oleh BUMN dan tingkat pengungkapan risiko yang bersifat *voluntary disclosure* oleh BUMN. Diharapkan dari penelitian ini ada tindak lanjut berupa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tingkat pengungkapan risiko BUMN di Indonesia.

Tanggal Masuk:  
**Desember, 2020**  
Tanggal Revisi:  
**Desember, 2020**  
Tanggal diterima:  
**Desember, 2020**

**Kata Kunci:** Pengungkapan Risiko BUMN; Teori Institusional; Tingkat Pengungkapan Risiko; *Manual Content Analysis*

**Abstract.** *This study examines risk disclosure which is currently a fairly hot discussion among researchers. There are few studies have examined the relationship between mandatory disclosure and corporate voluntary disclosure. In this study, researchers will conduct a descriptive study of mandatory and voluntary disclosure conducted by BUMN in Indonesia. The result of the research shows that the level of mandatory disclosure that should be carried out by SOEs and the level of risk disclosure that is voluntary by BUMN. It is hoped that from this research there will be a follow-up in the form of government policies to improve the level of disclosure of BUMN in Indonesia.*

**Keywords:** *BUMN Risk Disclosure; Institutional Theory; Risk Disclosure Level; Manual Content Analysis*

Mengutip ini sebagai:  
Priatnasari, Y., Hetika,  
Widianto, A., (2020).  
Pengungkapan Risiko  
Pada Perusahaan Milik  
Negara (*State Owned  
Enterprise*). *Journal of  
Public and Business  
Accounting*, 1(2). 24-  
32

### PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh pengungkapan mandatory terhadap pengaruh pengungkapan voluntary yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi pada BUMN beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah terbongkarnya dugaan penyelundupan di maskapai Garuda Indonesia dinilai bisa menjadi pintu masuk pengungkapan masalah-masalah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

<sup>1</sup> Program Studi D III Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, [yeni.priatna@gmail.com](mailto:yeni.priatna@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi D III Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, [hetika.maksi@gmail.com](mailto:hetika.maksi@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi D III Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, [andri.widianto@gmail.com](mailto:andri.widianto@gmail.com)

seperti dugaan gagal bayar Asuransi Jiwasraya dan dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN) (Amindoni, 2019)

Selain fenomena tersebut berdasarkan survey yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2017 yang dilakukan pada 7 negara Asia adalah bahwa *State Owned Enterprises* sering tunduk pada pengungkapan yang lemah dibandingkan perusahaan yang terdaftar di Bursa (OECD, 2017). Demikian pula penelitian yang telah dilakukan oleh Kharis & Suhardjanto (2012) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa tingkat ketaatan pengungkapan wajib perusahaan BUMN di Indonesia dalam mengungkapkan informasi mengenai pos laba rugi terbukti masih rendah padahal pos tersebut merupakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang harus dilakukan oleh BUMN. Kewajiban pengungkapan tersebut sesuai dengan SE Bapepam No.2 Tahun 2002 dan 2008. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan melihat seberapa tingkat pengungkapan wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*) yang telah dilakukan oleh BUMN. Demikian pula kerugian yang terjadi pada BUMN yang di sampaikan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017 bahwa kementerian BUMN mencatat 24 perusahaan yang mengalami kerugian sebesar Rp 5,852 triliun pada kuartal pertama 2017. Jumlah tersebut dilaporkan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp5,826 triliun (BBCnews, 2017).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengungkapan Risiko**

Pengungkapan risiko perusahaan sangat penting karena dapat meningkatkan transparansi perusahaan; sehingga aktivitas perusahaan di pasar modal dapat ditingkatkan selain itu juga meningkatkan nilai di mata para pemegang saham (Deumes, 2008). Pengungkapan risiko adalah komunikasi dalam memberikan pernyataan informasi (Beretta & Bozzolan, 2004). Memberikan informasi yang berkaitan dengan tujuan strategi perusahaan, berarti manajer telah meningkatkan transparansi dan mengurangi adanya disparitas antara pemahaman investor dan harapan terhadap apa yang dapat diberikan oleh manajemen (Deumes, 2008). Selain meningkatkan nilai perusahaan terhadap pemegang saham, transparansi perusahaan adalah salah satu cara untuk memberikan informasi yang memadai. Semakin relevan dan reliable informasi akuntansi yang disajikan, maka ketepatan pengambilan keputusan pemegang saham akan dapat ditingkatkan. Adanya transparansi dari perusahaan akan dapat meningkatkan kepercayaan dari para investor. Transparansi akan mengurangi disparitas antara persepsi investor dengan apa yang disajikan oleh manajemen (Deumes, 2008). Menyajikan pengungkapan secara tidak memadai berarti manajer mempunyai informasi yang berlebih daripada para investor yang mungkin saja tidak memahami risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Healy, Hutton, & Palepu, 1999). Beberapa model pengungkapan risiko yang diperluas mempunyai dua keuntungan bagi perusahaan, pertama dapat memperbaiki kesalahan valuasi perusahaan, dan yang kedua untuk meningkatkan ketertarikan pada institusi dan likuiditas saham perusahaan (Healy et al., 1999).

Tujuan dari adanya pengungkapan risiko bagi perusahaan menurut (Collier, 2009) adalah untuk menunjukkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan yang telah teridentifikasi, dikelola, dianalisa dan dievaluasi. Informasi tersebut termasuk strategi perusahaan, karakteristik perusahaan, kegiatan operasional dan faktor eksternal lainnya.

### **Teori Institusional**

Teori institusional adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku organisasi. Didalam teori institusional menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku organisasi yang terdiri dari dua kategori, yaitu yang pertama pengaruh lingkungan yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomis (efisiensi dan efektivitas) dan kedua adalah pengaruh lingkungan yang lebih menitikberatkan pada aspek sosio-kultural.

Prinsip dari teori institusional adalah bahwa untuk menjalankan keberlangsungan hidupnya sebuah organisasi harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan aturan-aturan atau norma sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat diterima dalam lingkungannya. Semakin tepat

sebuah organisasi menyesuaikan diri maka akan semakin mudah organisasi tersebut diterima serta mendapatkan legitimasi dari organisasi-organisasi di sekitarnya.

Beberapa penelitian yang telah menjelaskan teori institusional di antara lain adalah penelitian dari (Hessels & Terjesen, 2010) dan (Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017)

### **Badan Usaha Milik Negara**

Badan Usaha Milik Negara atau yang lebih sering dikenal BUMN menurut UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN memiliki pengertian suatu badan usaha, dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan BUMN terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Saat ini BUMN memiliki beberapa bentuk diantaranya adalah perusahaan perseroan (persero) dimana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selain itu BUMN juga dapat berbentuk Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bentuk lain selain persero dan perseroan terbuka, BUMN juga dapat berbentuk Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini diantaranya adalah penelitian dari (Kurniawanto, Suhardjanto, Bandi, & Agustiningsih, 2017) yang meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel dari keseluruhan perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa Efek Indonesia. Penelitian lainnya adalah penelitian dari (Kharis & Suhardjanto, 2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Governance* dengan tingkat ketaatan wajib untuk BUMN pada tahun 2012. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh (Probohudono, 2012) yang melakukan penelitian perbandingan pengungkapan risiko sukarela (*voluntary risk disclosure*) dari berbagai negara. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu tentang pengungkapan risiko:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul
<b>Kurniawanto, et al, 2017</b>	<i>Corporate Governance and Corporate Risk Disclosure : Empirical Evidence of Non- Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange</i>
<b>Kharis &amp; Suhardjanto, 2012</b>	<i>Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib Pada Badan Usaha Milik Negara</i>
<b>Probohudono, Agung Nur, 2012</b>	<i>A Comparative Analysis of Voluntary Risk Disclosures</i>
<b>Bebbington et al, 2008</b>	<i>Corporate social reporting and reputation risk management</i>
<b>Amran et al, 2008</b>	<i>Risk reporting An exploratory study on risk management</i>

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan BUMN yang terdiri dari 115 perusahaan dengan sampel data tahun 2016 sd 2018 yang dipilih dengan kriteria: Menampilkan laporan keuangan pada website perusahaan, menyajikan laporan keuangan secara lengkap (laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan), mengeluarkan annual report secara rutin, dan mengeluarkan sustainability report setiap tahun. Terdapat 14 bidang

industry BUMN yang saat ini ada mulai dari dari manufaktur hingga telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report dari masing-masing BUMN.

Dari keseluruhan BUMN yang telah diteliti berikut ini adalah hasil BUMN yang memiliki laporan keuangan:

Table 1 Jumlah BUMN yang mengunggah Laporan Keuangan

Keterangan BUMN	Jumlah Perusahaan
Jumlah BUMN	115 perusahaan
Jumlah BUMN yang memiliki website	112 perusahaan
Jumlah BUMN yang mengunggah laporan keuangan	74 perusahaan

Sumber: data sekunder yang diolah

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

#### 1) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2007) dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini akan berupa catatan atas pelaporan keuangan pada BUMN.

#### 2) Studi Pustaka

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) studi pustaka yaitu bahan utama dalam penelitian data sekunder. Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal/literatur, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan analisa annual report pada BUMN.

### Model Penelitian

Model penelitian ini adalah dengan menggunakan model kualitatif deskriptif dimana peneliti akan menjelaskan tentang hasil yang telah ditemukan dalam penelitian



Gambar 1 Alur pemikiran penelitian

## HASIL ANALISIS

### Statistik Deskriptif

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan BUMN yang pada tahun 2020 masih tercatat pada kementerian BUMN berjumlah 115 perusahaan. Sampel perusahaan yang diteliti pada penelitian ini adalah sejumlah 74 perusahaan. Penentuan sampel perusahaan adalah perusahaan yang menampilkan annual report selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 sd 2018. Daftar perusahaan yang masuk kriteria tersebut dapat dilihat pada lampiran.

Berikut ini adalah data BUMN yang menjadi populasi dan perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Sampel

Jumlah BUMN tercatat di tahun 2018	115 perusahaan
Perusahaan yang tidak menampilkan annual report	41 perusahaan
Perusahaan yang menampilkan annual report selama 3 tahun berturut-turut	74 perusahaan

Sumber: data sekunder yang diolah (2020)

Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif data yang telah diolah:

Tabel 2 Tingkat Pengungkapan Wajib BUMN

	2016	2017	2018
Manajemen Risiko	74	74	74
Komite Manajemen Risiko	50	49	50
Rencana Kerja Anggaran Tahunan	74	73	74
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/Pengawas	55	52	54
Identitas Dewan Komisaris/Pengawas	73	72	73
Pekerjaan Utama Dewan Komisaris	35	38	36
Jabatan Dewan Komisaris diperusahaan Lain	35	41	38
Rapat - Rapat Yang Dilakukan	74	74	73
Honorarium Dewan Komisaris	74	74	74
Fasilitas/Tunjangan Dewan Komisaris	74	74	74
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	3	3	3
Jumlah	621	624	623
Min	3	3	3
Max	74	74	74
Average	56	57	57

Sumber: data sekunder yang diolah (2020)

Dari data tersebut terlihat bahwa pengungkapan wajib yang dilakukan oleh BUMN paling banyak dilakukan adalah pada penyampaian tentang rapat-rapat yang dilakukan, honorarium dan fasilitas/tunjangan dewan komisaris. Sedangkan pengungkapan yang terendah adalah pada kepemilikan saham dewan komisaris yang masih minim dalam penyampaian dalam laporan tahunan yang disampaikan perusahaan. Sedangkan dari tahun ke tahun pengungkapan wajib meningkat pada tahun 2017 dan sedikit menurun pada tahun 2018. Jika dilihat dari total pengungkapan yang seharusnya adalah sekitar 814 maka tingkat pengungkapan sebesar 621 pada tahun 2016 berarti menempati 76,2 % total pengungkapan wajib. Sedangkan pada tahun 2017 menempati 77% dari total pengungkapan wajib serta pada tahun 2018 menempati 76,5 % dari total pengungkapan wajib.

Tabel berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat pengungkapan sukarela berkaitan dengan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh BUMN selama tiga tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018. Pengungkapan sukarela yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko menggunakan kriteria dari (BSN, 2018) yang berupa risiko kebijakan, risiko kepatuhan, risiko legal, risiko fraud, risiko reputasi dan risiko operasional.

Tabel 3 Tingkat Pengungkapan Sukarela Manajemen Risiko BUMN Thn 2016 sd 2018

	Jumlah	% tase	2017	Jumlah	% tase	2018	Jumlah	% tase
Risiko Kebijakan	210	24%		215	24%		211	25%

Ketidakpastian Lingkungan	9			8			11		
Peraturan Pemerintah	71			72			70		
Pesaing	49			53			50		
Manajemen	72			72			71		
Perubahan Industri	7			8			7		
Perubahan Politik	2			2			2		
Risiko Kepatuhan		22	3%		21	2%		19	2%
Kepatuhan Terhadap Aturan	16			15			13		
Kepatuhan Terhadap Aturan Keuangan	2			2			2		
Kepatuhan Terhadap Aturan Hukum	3			3			4		
Risiko Litigasi	1			1			0		
Risiko Legal		168	20%		175	20%		171	20%
Litigasi	29			33			35		
Anak Perusahaan	69			71			67		
Persaingan	70			71			69		
Risiko Fraud		24	3%		22	2%		22	3%
Kecurangan Manajemen dan Karyawan	15			15			15		
Tindakan Ilegal	9			7			7		
Risiko Reputasi		151	18%		158	18%		150	17%
Kinerja Keuangan	71			71			71		
Kualitas Manajemen	8			3			3		
Kinerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	15			15			13		
Kualitas Pekerja	14			14			14		
Goodwill	43			55			49		
Risiko Operasional		286	33%		290	33%		288	33%
Kepuasan Pelanggan	69			72			72		
Efisiensi	72			72			71		
Pengendalian Internal	74			73			73		
Manajemen Risiko	71			73			72		
Total pengungkapan sukarela		861	100%		881	100%		861	100%
Min	1			1			0		
Max	74			73			73		
Average	35.9			36.7			35.9		

Sumber: data sekunder yang diolah (2020)

Pada tabel yang diatas terlihat bahwa pada tahun dari thn 2016 hingga tahun 2018 tingkat pengungkapan sukarela yang paling tinggi adalah pada pengungkapan risiko operasional yang mendapatkan porsi sebesar 33% dari keseluruhan tahun dan di lanjutkan pengungkapan tentang

risiko kebijakan sebesar 24%. Sedangkan tingkat pengungkapan yang terendah selama tiga tahun berturut-turut adalah pada tingkat pengungkapan risiko kepatuhan dan risiko kecurangan. Sedangkan dari keseluruhan tingkat pengungkapan hampir semua perusahaan telah menampilkan pengungkapan sukarela dalam bidang manajemen risiko.

## PEMBAHASAN

Dari hasil statistik deskriptif diatas terlihat bahwa tidak semua perusahaan BUMN melakukan upload annual report didalam masing-masing website perusahaan. Terlihat dari 115 perusahaan hanya terdapat 74 perusahaan yang menyajikan annual report secara rutin dalam tiga tahun terakhir. Diluar itu perusahaan tidak menampilkan annual report dalam website perusahaan bahkan perusahaan BUMN tidak dapat diakses website nya.

Meskipun telah ada peraturan yang mewajibkan BUMN untuk menyampaikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan secara publik seperti yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RI, 2008) akan tetapi masih ada BUMN yang tidak menyajikan website perusahaan dan annual report.

Item Pengungkapan wajib yang telah dilakukan oleh BUMN masih berkisar di angka 76% dari keseluruhan perusahaan yang menampilkan beberapa item pengungkapan wajib dalam annual report nya. Pengungkapan wajib yang paling rendah disampaikan oleh BUMN yang menyajikan annual report secara berturut-turut berkaitan dengan kepemilikan saham dewan komisaris. Hal itu disebabkan karena BUMN adalah perusahaan yang sebagian besar bahkan keseluruhan modal saham nya merupakan kepemilikan pemerintah. Sedangkan pengungkapan wajib yang hampir semua BUMN telah menyampaikan diantaranya adalah pengungkapan tentang manajemen risiko, rencana kerja anggaran tahunan, rapat-rapat yang dilakukan, honorarium dewan komisaris dan fasilitas/tunjangan yang diberikan kepada dewan komisaris.

Berbeda dengan tingkat pengungkapan manajemen risiko voluntary yang dilakukan oleh BUMN dari keseluruhan manajemen risiko yang telah dilakukan BUMN risiko kebijakan dan risiko operasional menempati tingkat pengungkapan yang paling tinggi. Dimana di dalam tingkat pengungkapan tersebut terdapat

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa perusahaan milik pemerintah dalam hal ini adalah BUMN belum melakukan tingkat pengungkapan wajib secara menyeluruh dalam laporan tahunan yang dilakukan setiap tahun nya. Padahal ketentuan untuk melakukan pengungkapan wajib harus nya telah dilakukan baik oleh BUMN yang melakukan go publik ataupun tidak. Karena hal ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN PER — 01 /MBU/2011 (BUMN, 2011).

Diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih mendukung tercapainya pengungkapan wajib BUMN yang dilakukan oleh perusahaan negara tersebut. Karena amanah yang telah dititipkan Undang-Undang atas kehadiran dari BUMN adalah sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga merupakan kewajiban bagi BUMN untuk dapat menyampaikan hasil kinerja operasional maupun keuangan BUMN.

## PUSTAKA ACUAN

- Amindoni, A. (2019). Bersih-bersih' Badan Usaha Milik Negara: 'Masih banyak lagi yang harus dibersihkan, Erick jangan terbang pilih. *BBC Indonesia*. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50682373>
- BBCnews. (2017). Indonesia kehilangan Rp5,8 triliun akibat 24 BUMN rugi di 2017. Diambil 5 Agustus 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41107226>
- Beretta, S., & Bozzolan, S. (2004). A Framework for the Analysis of Firm Risk Communication. *The International Journal of Accounting*, 39, 265–288. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2004.06.006>
- BSN. (2018). *Grand Desain Penerapan Manajemen Risiko*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- BUMN. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan

- Usaha Milik Negara (2011). Indonesia.
- Collier, P. . (2009). *Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers : Tools and Techniques*. Elsevier.
- Deumes, R. (2008). Corporate risk reporting : A Content Analysis of Narrative Risk Disclosures in Prospectuses. *Journal of Business Communication*, 45(2), 120–157. <https://doi.org/10.1177/0021943607313992>
- Healy, P. M., Hutton, A. P., & Palepu, K. G. (1999). Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increases in Disclosure. *Contemporary Accounting Research*, 16(3), 485–520. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1999.tb00592.x>
- Hessels, J., & Terjesen, Æ. S. (2010). Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect export choices, 203–220. <https://doi.org/10.1007/s11187-008-9156-4>
- Kharis, A., & Suhardjanto, D. (2012). Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib Pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1), 37–44.
- Kurniawanto, H., Suhardjanto, D., Bandi, & Agustiningsih, S. W. (2017). Corporate Governance and Corporate Risk Disclosure : Empirical Evidence of Non- Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business adn Economics Research*, 6(4), 255–270.
- Martínez-Ferrero, J., & García-Sánchez, I. M. (2017). Coercive, normative and mimetic isomorphism as determinants of the voluntary assurance of sustainability reports. *International Business Review*, 26(1), 102–118. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.05.009>
- OECD. (2017). *Disclosure and Transparency in the State-Owned Enterprise Sector in Asia Stocktaking of National Practices*.
- Probohudono, A. N. (2012). *A Comparative Analysis of Voluntary Risk Disclosures*. Curtin University.
- RI, P. UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, UU No 14/2008 § (2008). Indonesia.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Amindoni, A. (2019). Bersih-bersih' Badan Usaha Milik Negara: 'Masih banyak lagi yang harus dibersihkan, Erick jangan terbang pilih. *BBC Indonesia*. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50682373>
- BBCnews. (2017). Indonesia kehilangan Rp5,8 triliun akibat 24 BUMN rugi di 2017. Diambil 5 Agustus 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41107226>
- Beretta, S., & Bozzolan, S. (2004). A Framework for the Analysis of Firm Risk Communication. *The International Journal of Accounting*, 39, 265–288. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2004.06.006>
- BSN. (2018). *Grand Desain Penerapan Manajemen Resiko*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- BUMN. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (2011). Indonesia.
- Collier, P. . (2009). *Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers : Tools and Techniques*. Elsevier.
- Deumes, R. (2008). Corporate risk reporting : A Content Analysis of Narrative Risk Disclosures in Prospectuses. *Journal of Business Communication*, 45(2), 120–157. <https://doi.org/10.1177/0021943607313992>
- Healy, P. M., Hutton, A. P., & Palepu, K. G. (1999). Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increases in Disclosure. *Contemporary Accounting Research*, 16(3), 485–520. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1999.tb00592.x>
- Hessels, J., & Terjesen, Æ. S. (2010). Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect export choices, 203–220. <https://doi.org/10.1007/s11187-008-9156-4>
- Kharis, A., & Suhardjanto, D. (2012). Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib Pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1), 37–44.
- Kurniawanto, H., Suhardjanto, D., Bandi, & Agustiningsih, S. W. (2017). Corporate Governance and Corporate Risk Disclosure : Empirical Evidence of Non- Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business adn Economics Research*, 6(4), 255–270.
- Martínez-Ferrero, J., & García-Sánchez, I. M. (2017). Coercive, normative and mimetic isomorphism



- as determinants of the voluntary assurance of sustainability reports. *International Business Review*, 26(1), 102–118. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.05.009>
- OECD. (2017). *Disclosure and Transparency in the State-Owned Enterprise Sector in Asia Stocktaking of National Practices*.
- Probohudono, A. N. (2012). *A Comparative Analysis of Voluntary Risk Disclosures*. Curtin University.
- RI, P. UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, UU No 14/2008 § (2008). Indonesia.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*.